

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SANDY BASKARA

NPM : 157110499

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”**.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Drs. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
4. Bapak Parjiayana, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini terhadap apa yang telah diarahkan.
5. Kepada Kedua Orang Tua, bapak Asep Ferry dan ibu Riana dan Dwi Romadona Putri karena telah memberi semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Proposal ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk merajut masa depan, terutama untuk Chairul fahmi, Tyo ardiansyah, Doer, Rahman itam, Wiri Opuk, Wisnu skuy living, Tomi pace, Badrul adam, Ory pak boy, Mas manto dan teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik angkatan 2015 terutama kelas AP D.
8. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

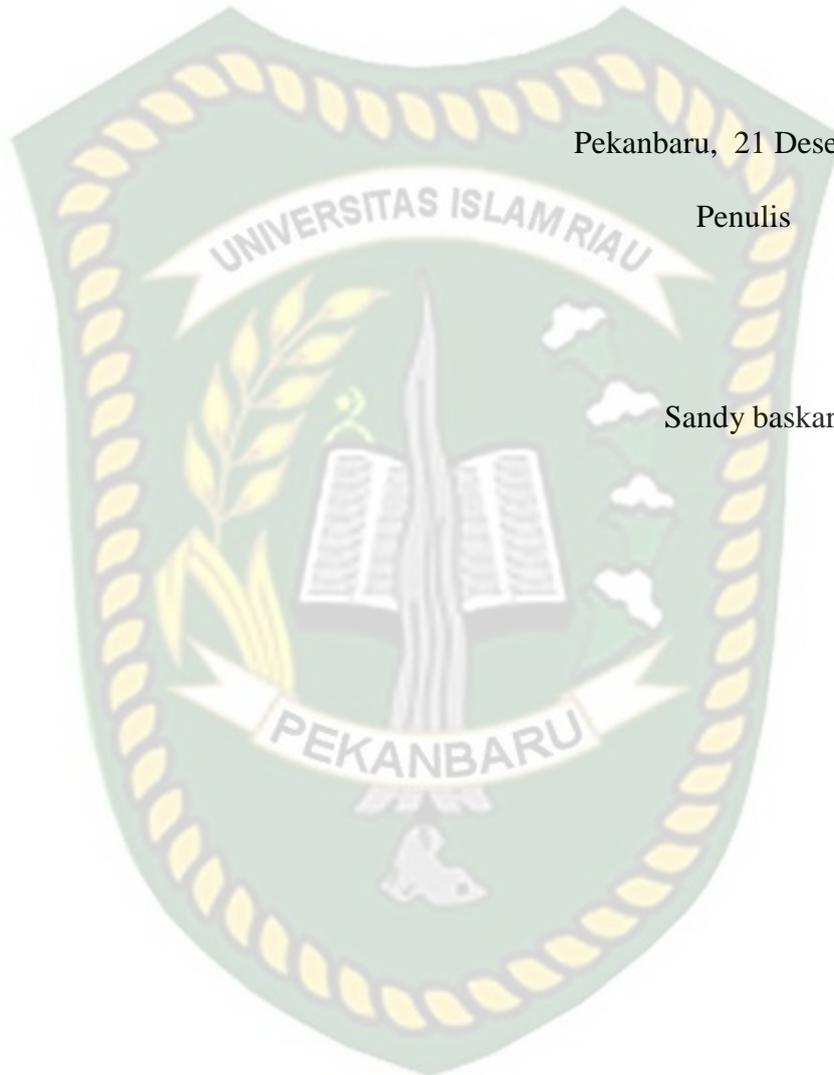
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Aamiin

Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 21 Desember 2019

Penulis

Sandy baskara



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
SURAT PERNYATAAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	27
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	27
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	29
A. Studi Kepustakaan	29
1. Konsep Administrasi	29
2. Konsep organisasi	31
3. Konsep manajemen	33
4. Pelaksanaan	35
5. Kebijakan	36
6. Pemerintah	38
7. Pembangunan	39
B. Kerangka Pikir	41
C. Konsep Operasional	43

D. Operasional Variable	46
E. Teknik Pengukuran	48
BAB III	54
METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi Dan Sampel	54
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis Dan Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik analisis data	57
BAB IV	59
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	59
B. Profil Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.	61
BAB V	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Responden	63
1. Jenis kelamin	63
2. Berdsarkan Usia	64
3. Pendidikan Responden	66
B. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.	68
1. Pengawasan	68
2. Pengendalian	72

3. Pengelolaan	75
4. Kualitas.....	78
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.	82
BAB VI	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86



DAFTAR TABEL

I.I	Rumah Tidak Layak Huni.....	5
I.II	Jumlah Rumah Yang Sudah Dilakukan Pembangunan Dikecamatan Tenayan Raya Tahun 2019.....	6
I.III	Rencana Kegiatan Dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018.....	7
I.IV	Strategi Dan Kebijakan RPJMD 2018-2022.....	18
I.V	Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	22
II.I	Operasional Variabel Tetang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	42
III.I	Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	51
III.II	Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	51
V.I	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	60
V.II	Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Usia Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni.....	61
V.III	Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni.....	63
V.IV	Distribusi Klasifikasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	65

V.V	Distribusi Klasifikasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengendalian Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	68
V.VI	Distribusi Klasifikasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengendalian Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	71
V.VII	Distribusi Klasifikasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kualitas Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	74
V.VIII	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Dikecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Wawancara	88
Lampiran II Daftar Pertanyaan Ke Responden.....	90
Lampiran III Tabel Teli.....	94
Lampiran IV Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni	97
Lampiran V Tabel Rumah Yang Sudah Di Bangun.....	102
Lampiran VI Surat Pengantar Dari Kampus K DPMPTSP.....	104
Lampiran VII Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.....	105
Lampiran VIII Surat Dari Dpmpptsp	106
Lampiran IX SK Pembimbing.....	107

DAFTAR GAMBAR

II. I Kerangka Pikir.....	39.
---------------------------	-----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandy Baskara
NPM : 157110499
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan demikian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2019
Pelaku Pernyataan

Sandy Baskara

“PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU”

ABSTRAK

Sandy Baskara

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman selaku pelaksana seperti bagaimana teknis dilapangan dan bagaimana pelaksanaan itu berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang dilakukan pihak terkait. Teknik pengukuran yang dilakukan yakni dengan menggunakan skala likert melalui pendekatan dengan memberi skor nilai untuk setiap kategori ukuran, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan survey deskriptif dimana peneliti menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara menggunakan, mengklasifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Populasi dan sampel pada pada penelitian ini yakni seksi, kapid, dan kadis dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari responden yakni kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, lebih lanjut teknik dalam pengumpulan data peneliti menggunakan kusioner, wawancara, dan observasi langsung lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dapat disimpulkan pelaksanaannya cukup terlaksana dengan skor 176 .

“IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN THE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD SERVICES IN TENAYAN RAYA DISTRICT PEKANBARU CITY”

ABSTRACT

Sandy Baskara

Keywords: Implementation of the Construction of Livable Houses

The purpose of this study is to find out how the implementation of the construction of livable houses carried out by the public housing agency and the residential area as the executor as how the regional implementation and how the implementation is running. This research was conducted by looking at the process of implementing livable housing construction by related parties. The measurement technique is by using a likert scale approach, through the approach of scoring values for each size category, in implementation the researcher analyzes the data by using a descriptive survey in which the researcher describes the actual state of what happened at the time of the study by using, classifying and analyzing so that the formulation of an analysis of the problem being faced can be obtained then a conclusion can be drawn. The population and sample in this study are section, district head, and district head office of public housing and residential areas. In this study, the type of data used is primary data in the form obtained directly from respondents namely the head of department, head of department, section head, further techniques in data collection researchers used questionnaires, interviews, and direct observation. Based on the results of research that has been conducted by researchers regarding the implementation of government policies in the construction of livable homes in the sub-district tenayan raya in Pekanbaru city it can be concluded that the implementation was 176

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi salah cabang dari ilmu sosial, administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, menurut siagian (2003;2) administrasi sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara singkat administrasi merupakan proses atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan inti administrasi adalah manajemen, karna manajemen merupakan serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi terutama pemimpin guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Administrasi meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara mereka melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka.

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi di bandingkan dengan negara tetangga. Berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Namun hal ini sepertinya tidak kunjung berkesudahan, kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir semua negara-negara berkembang, terutama negara dengan jumlah penduduk yang padat seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita sebagai

warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, sedikitnya lapangan kerja, keterbatasannya keterampilan yang dimiliki sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Untuk mengatasinya pemerintah sudah melakukan berbagai program salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Masyarakat miskin menurut standar badan pusat statistic yaitu ;

1. Jenis lantai tempat tinggal dari bambu, kayu murahan
2. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, kayu murahan, tembok tanpa plester.
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar.
4. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik
5. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, air sungai dan air hujan.
6. Kayu bakar untuk memasak sehari-hari
7. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam, telur satu minggu sekali
8. Hanya membeli 1 stel pakaian setiap tahun
9. Hanya sanggup makan satu/dua kali sehari
10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas
11. Sumber penghasilan kepala rumah tangga 600rb per bulan
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah

13. Tidak memiliki tabungan dan tidak ada barang yang bisa dijual.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarga. Rumah atau perumahan merupakan salah satu jenis kebutuhan dasar yang mutlak sebagaimana yang tertera di undang undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, kemudian dalam bagian satu pasal 1 dijelaskan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi ukuran agregat terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan, dalam rangka mewujudkan hunian yang layak huni bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas ke pada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. dengan begitu, pemerintah daerah (PEMDA) memiliki peran penting dalam pembangunan perumahan, sebab pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah

diarahkan agar mudah terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsinya rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya pembangunan rumah tidak layak huni demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana dan prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Dalam mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan program pemerintah yang tertera di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) Adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Sumatra. Provinsi ini terletak dibagian tengah pantai timur pulau Sumatra, yaitu selat malaka. Hingga tahun 2004 provinsi ini juga meliputi kepulauan riau,

sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain pulau batam dan pulau bintan) yang terletak di bagian sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan singapura. Provinsi riau memiliki 12 kabupaten/kota, yang ibukotanya pekanbaru riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya di dominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat, tetapi tidak menutup angka kemiskinan yang ada di riau. Yang mana jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi riau pada maret 2019 mencapai 490,72 ribu jiwa. Jika dibandingkan maret 2018, jumlah penduduk miskin riau menurun 9,72 ribu jiwa orang dari sebelumnya 500,44 ribu jiwa hal ini dikatakan *kepala bidang statistic sosial badan pusat statistic (BPS) Achmad azari (senin 12-8-2019)*. Dengan adanya program pemerintah sebagai mana yang tertuang di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Provinsi riau dapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 2.500 unit tahun 2019. Bantuan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di riau, khususnya daerah plosok desa yaitu. Untuk kabupaten Indragiri hilir (Inhil) sebanyak 230 unit rumah. Kota pekanbaru sebanyak 230 unit, Indragiri hulu sebanyak 190 unit, Kampar sebanyak 200 unit, kuansing sebanyak 250 unit, pelalawan 220 unit, rokan hilir sebanyak 200 unit, rokan hulu 250 unit, siak sebaik 190 unit, dumai sebanyak 140 unit, meranti 200 unit, bengkalis 200 (*sumber portal riau.go.id*). banyak bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah membuat gubernur mengeluarkan peraturan gubernur riau nomor

21 tahun 2019 tentang pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Yang mana bahwa untuk penunahan hak rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera memperoleh perumahan yang layak huni, perlu pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, bahwa peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi riau tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi riau tahun 2014-2019 dan peraturan daerah provinsi riau nomor 16 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dilaksanakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Pekanbaru dulu dikenal dengan sebutan “*senapelan*” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut “*batin*” daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Pekanbaru ialah ibu kota provinsi riau yang mempunyai luas 632.26 km² dan secara astronomi terletak di antara 0° 25' - 0° 45' lintang utara dan 101° 14' - 101° 34' bujur timur. Dibagian utara kota pekanbaru di berbatasan dengan kabupaten siak di bagian timur berbatasan dengan kabupaten siak dan kab. Pelalawan dibagian selatan berbatasan dengan kab. Pelalawan dan kab. Kampar, dibagian barat berbatasan dengan kab. Kampar. Pekanbaru berada di tengah provinsi riau dan juga berada di lintasan jalur transportasi darat pulau Sumatra .

Secara administrasi pemerintah kota Pekanbaru dikepalai oleh walikota, yang berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2003 dimekarkan dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 kecamatan.

Wilayah administrasi kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi kelurahan yang beedasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 , dimekarkan dari 58 wilayah administrasi kelurahan menjadi 83 kelurahan. Banyak kelurahan yang tersebar di kota Pekanbaru membuat pemerintah berkerja ekstra dalam menjalan program rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Adapun jumlah rumah yang tidak layak huni yang telah di verifikasi pemda berjumlah 2.676 rumah yang sebelumnya rumah layak huni versi Badan Data Terpadu (BDT) berjumlah 11.867 rumah yang tidak layak huni. Data Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) merupakan data yang sama dengan sistem informasi rumah swadaya, yang bersumber dari data olahan Badan Data Terpadu (BDT) dan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Bantuan stimulasi perumahan swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Bantuan stimulasi perumahan rakyat (BSPS) mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, serta untuk mengoptimalkan pengturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulasi rumah swadaya serta

melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (5) undang undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Dikota pekanbaru program pembangunan rumah layak huni dijlankan sejak tahun 2012 oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dikota pekanbaru jumlah rumah tidak layak huni masih tergolong cukup banyak dapat dilihat pada table berikut;

Table I.I Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di kota Pekanbaru 2019

Uraian	Kecamatan	Jumlah	Satuan
Rumah Tidak Layak Huni	Senapelan	230	Unit
	Bukit raya	199	Unit
	Tampian	435	Unit
	Lima puluh	77	Unit
	Marpoyan damai	227	Unit
	Payung sekaki	123	Unit
	Pekanbaru kota	161	Unit
	Rumbai	525	Unit
	Sail	34	Unit
	Tenayan raya	258	Unit
	Sukajadi	155	Unit
	Runbai pesisir	252	Unit
	Total		2.676

Sumber; dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru 2019

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah rumah tidak layak huni dikota pekanbaru perlu adanya penyelesaian melalui program pembangunan rumah layak huni sebagai upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di 12 kecamatan kota pekanbaru. Dari data diatas penulis memfokuskan penelitian di kecamatan tenayan raya yang memiliki rumah tidak layak huni 258 unit dan beberapa alasan.

Kota pekanbaru sebagai ibu kota provinsi riau menuju kota metropolitan madani tentu akan menjadi sorotan bersama bila hal ini tetap terjadi. Bukan hanya akan

memperlihatkan kesenjangan sosial yang semakin jelas, bahkan akan tampak jelas kurangnya pemerataan pembangunan untuk masyarakat miskin yang mengindikasikan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan begitu pemerintahan kota pekanbaru mengeluarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 95 tentang tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru

Adapun tugas dan fungsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam peraturan walikota pekanbaru nomor 95 tahun 2016 sebagai berikut;

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.

- (1) Kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman .
- d. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan perumahan dan permukiman.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan. Bidang perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah komersil, dll
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan dan pelaksanaan inventarisiasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah khusus, rumah komersil, rumah umum, rumah swadaya. Rumah negara.
- d. Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat di terapkan untuk pembangunan perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- e. Penyediaan data kondisi perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah komersil, rumah negara, dan rumah bantuan swadaya yang di perhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana, dan fasilitas yang ada.
- f. Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah komersil, rumah negara dan rumah bantuan swadaya.
- g. Perumusan dan pelaksanaan peyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan rumah bantuan swadaya.
- h. pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- i. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan
- j. Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan.
- k. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah umum, rumah khusus,

rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dbangun pemerintah dari dana APBN, APBD dan Swasta).

l. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memperoses pengaturan dan pemberi izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. penyediaan pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan bantuan rumah swadaya.

n. Penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Perumahan Terdiri dari;

- a. Seksi Pendataan Dan Perencanaan.
- b. Seksi Penyediaan Dan Pelaksanaan
- c. Seksi Pemantauan Dan Evaluasi

Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan

Pasal 11

(1) Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan Dalam Melaksanakan Tugas Membantu Kepala Bidang Perumahan Dalam Melaksanakan Sub Urusan Pendataan Dan Perencanaan.

(2) Seksi pendataan dan perencanaan perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan bantuan rumah swadaya
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pendataan dan perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil, dan bantuan rumah swadaya.
- d. Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat di terapkan untuk pembangunan perumahan negara dan rumah bantuan swadaya.
- e. Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, dan bantuan rumah swadaya yang di perhitungkan dari kependudukan fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana-sarana dan fasilitas yang ada.
- f. Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- g. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pembangunan perumahan bidang perumahan umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- i. Pemberian pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah bantuan swdaya
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyediaan Dan Pelaksanaan

- (1) Seksi pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bidang perumahan dalam melaksanakan sub urusan pemanfaatan dan evaluasi.
- (2) Seksi pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi.
 - a. Pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memiliki criteria untuk mengukur keberhasilannya yaitu; pengawasan, pengendalian, pengelolaan, kualitas.
- d. Pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan.

Seksi Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Seksi pemantauan dan evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bidang perumahan dalam melaksanakan sub urusan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Seksi pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan pelaksanaan.

- c. Perumusan dan pelaksana pembuatan laporan pengelolaan pembangunan perumahan
- d. Pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah di keluarkan.
- e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
- f. Penerbitan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian visi dan misi kota pekanbaru serta penanggulangan kemiskinan pemerintah kota pekanbaru sejak tahun 2012 telah menetapkan program rumah layak huni, yaitu program yang membantu penyediaan kebutuhan rumah bagi keluarga kurang mampu serta dalam mewujudkan program nasional sejuta rumah. Sampai dengan tahun 2018 pemerintah kota pekanbaru telah membangun sebanyak 1.090 buah rumah layak huni dan peningkatan rumah sebanyak 824 rumah yang sudah di renovasi yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di kota pekanbaru. Dan ada pun sumber dana pembangunan rumah layak huni berasal dari anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) kota pekanbaru.

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di kota pekanbaru, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyadari sepenuhnya akan peran dimasa yang akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi masalah infrastruktur dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman yang timbul akibat perubaham pola hidup

masyarakat perkotaan. Masalah banjir yang masih menghantui kawasan perkotaan serta buruknya persoalan seperti air bersih yang harus diselesaikan secara bertahap.

Rencana strategis merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, untuk menjalankan peran penting tersebut. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempunyai visi;

VISI

“ terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang handal dan berkelanjutan menuju masyarakat yang madani”

Penjelasan makna misi;

a. Perumahan

Perumahan adalah kumpulan perumahan sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya untuk pemenuhan ruang layak huni.

b. Kawasan permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan perkotaan dan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.

c. Handal

Handal adalah tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dinas perumahan rakyat dan kawasan

permukiman kota pekanbaru yang produktif dan cerdas, berkeselamatan mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan.

d. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah pembangunan dan pengembangan permukiman menjamin berkelanjutan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar permukiman.

e. Masyarakat madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai moral serta memiliki rasa kepedulian dalam memelihara menjaga pembangunan infrastruktur yang ada.

MISI;

Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (renstra SKPD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Tabel I.II Strategi dan kebijakan RPJMD 2018-2022

Misi	RPJMD PEKANBARU TAHUN 2018- 2022
Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah lingkungan (green city)	
Tujuan	
Mewujudkan pekanbaru sebagai kota layak huni (liveable city)	

Sasaran Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan profesionalisme aparaturnegara	a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	-memberikan reward and punishment -Meningkatkan SDM yang professional	Peningkatan kesejahtraan
	b. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	-membangun sarana dan prasarana kantor yang memadai	-rehabilitas gedung kantor -peningkatan dalam sarana dan prasarana IT
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Terselesainya pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni	-meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak -mensinergikan kegiatan SKPD dengan stackholder	-Peningkatan fasilitas pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu -peningkatan kualitas rumah
	Terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas merata	-menetapkan pembangunan jalan dan drainase lingkungan -membangun sumber air bersih dikawasan yang tidak terlayani PDAM -membangun IPAL komunal dan MCK	-pemeliharaan rehabilitas dan peningkatan jalan lingkungan dan saluran lingkungan -penyediaan air bersih bagi masyarakat yang tidak terlayani PDAM -pembangunan IPAL komunal dan MCK + untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber dinas perkim

Program pembangunan rumah layak huni (RLH) dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi penduduk kurang mampu atau miskin. Upaya pembangunan RLH diharapkan akan mampu menekan angka kemiskinan dibidang infrastruktur karena

salah satu indicator yang digunakan untuk mengkategorikan masyarakat miskin adalah terkait dengan kondisi perumahan atau tempat tinggal keluarga miskin. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan walikota pekanbaru nomor 95 tahun 2016 yang melaksanakan pembangunan perumahan layak huni ialah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. yang mana dinas perkim mempunyai rencana kerja sebagai berikut;

I.III Tabel Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Program dan kegiatan	Indicator kinerja/ program kegiatan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan		Unit kerja OPD penanggung jawab
		Target	Rp	
Program pengembangan perumahan	jumlah distrik yang dikembangkan perumahan yang berkualitas jumlah kawasan permukiman yang di kembangkan peningkatan kualitas perumahan		88.48.397.000	
Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah unit perumahan masyarakat kurang mampu yang di fasilitasi dan di stimulant	450	4.500.000.000	DINAS PERKIM
Pengembangan perumahan dan pemukiman berbasis masyarakat wilayah I	Pengembangan p2p di kecamatan bagi masyarakat kurang mampu di kota pekanbaru	4000	5.000.000.000	DINAS PERKIM
Perencanaan pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan p2p	1	1.000.000.000	DINAS PERKIM

Program dan kegiatan	Indicator kinerja/ program kegiatan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan		Unit kerja OPD penanggung jawab
		Target	Rp	
perumahan				
Monitoring, evaluasi, dan pengendalian	Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan perumahan	2	300.000.000	DINAS PERKIM
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan bidang perumahan	1	200.000.000	DINAS PERKIM
Pendataan dan perencanaan rumah perkotaan	Jumlah dokumen pendataan dan dokumen perencanaan	1	350.000.000	DINAS PERKIM
Pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah II	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah II	15.000	15.000.000.000	DINAS PERKIM
Pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah III	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah III	10.000	10.000.000.000	DINAS PERKIM
Pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah IV	Panjang jalan lingkungan yang terbangun di wilayah IV	15.000	15.000.000.000	DINAS PERKIM
Pengembangan perumahan dan permukiman berbasis masyarakat wilayah II	Pengembangan p2p di kecamatan bagi masyarakat kurang mampu di kota pekanbaru	95.000	8.500.000.000	DINAS PERKIM
Pemeliharaan jalan lingkungan dan saluran	Panjang jalan dan saluran lingkungan yang di pelihara	4000	4.5000.000.000	DINAS PERKIM

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018.

Melihat rencana kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang ada diatas yang memiliki tujuan melakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Rencana kerja tahun 2018 ini direlalisasikan di tahun sekarang yaitu 2019. Renja di dibuat untuk mempermudah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam menjalan program-program yang telah di agendakan.

Tenayan merupakan salah satu kecamatan yang ada dikota pekanbaru yang mempunyai luas wilayah 171 km² dan yang paling luas diantara kecamatan yang ada dikota pekanbaru, dan juga memiliki kelurahan yang terbanyak di antara kecamatan lain yaitu 13 kelurahan yaitu; Rejo sari, Tangkereng timur, Kulim, Mentangor, Bencah lesung, Silang bakti, Pematang kapau, Melebung, Bambu kuning, Tenayan industry, Tuah negeri, Pematang kapau, Pematang kapau, Pematang kapau dan memiliki RT dan RW sebagai berikut

Tabel I.IV Jumlah Rt/Rw Di Kecamatan Tenayan Raya 2019

No	Kelurahan	RT	RW
1	Kulim	9	4
2	Tangkareng timur	39	10
3	Rejo saru	68	17
4	Bencah lesung	43	10
5	Sialang sakti	64	15
6	Pebatuan	24	12
7	Mentangor	58	18
8	Pematang kapau	54	13
9	Sialang rampai	24	7
10	Tuah negeri	17	7
11	Melebung	4	1
12	Industry tenayan	9	2
13	Bambu kuning	49	13
Jumlah		2.838	129

Sumber badan pusat statistic kota pekanbaru 2019

Di kecamatan tenayan pemerintah kota pekanbaru khususnya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman telah membangun rumah sebanyak 30 unit ditahun 2019. 30 rumah yang sudah di layak hunikan dari jumlah 258 unit yang terdata tidak layak huni yang dapat dilihat di tabel berikut;

Tabel I.V Jumlah Rumah Yang Sudah Dilakukan Pembangunan Di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah
1	Kelurahan Mentangor	5
2	Kelurahan Bencah Lesung	5
3	Kelurahan Bambu Kuning	4
4	Kelurahan Rejo Sari	6
5	Kelurahan Silang Sakti	4
6	Kelurahan Kulim	6
Jumlah		30

Sumber dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PERKIM)

Melihat tabel diatas pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru khususnya kecamatan tenayan raya ada 6 kelurahan yang sudah dilakukan pembangunan, hal ini harus menjadi perhatian dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman selaku pelaksana pembangunan rumah layak huni ini.

Adapun sumber pendanaan pembangunan rumah layak huni ini 1) dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya menggunakan dana APBN dialokasikan melalui Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2) dana anggaran khusus (DAK) Pemanfaatan dana DAK sesuai dengan yang diatur dalam Batang Tubuh Peraturan Menteri tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bahwa pemanfaatan dana DAK dipergunakan

untuk pembangunan fisik rumah melalui kegiatan PB dan PK, sedangkan non fisik yaitu kegiatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian untuk gaji dan operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dapat memanfaatkan tenaga lokal, serta petugas e-monitoring DAK.

3) Dana anggaran pedapatan belanda daerah (APBD)

Pemanfaatan dana APBD diperuntukkan kegiatan penyiapan pelaksanaan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya seperti pendataan, penyusunan proposal Calon Penerima Bantuan (CPB), pendampingan masyarakat, dan penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (URK). Demikian juga apabila dana DAK penunjang berupa kegiatan pengawasan dan pengendalian tidak mencukupi, maka Dinas Bidang PKP dapat menganggarkan dana APBD.

pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima BSPS dengan cara pemindahan/ transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja , prmindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia, bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSPS, penarikan tunai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan. Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap masing-masing 50% dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan dari penerima BSPS.

Yang mana rencana kegiatan pembangunan rumah layak huni tahun 2018 di kecamatan tenayan raya sebagai berikut;

**Tabel I.VI Rencana Kegiatan Dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun Anggaran 2018**

No	Rencana kegiatan	Rencana kegiatan	Lokasi kegiatan	Jumlah	Kebutuhan dana
1	Bantuan stimulasi peningkatan kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.	Bantuan stimulasi peningkatan kualitas rumah, termasuk upah tukang	Bantuan stimulasi peningkatan kualitas rumah swadaya di kecamatan tenayan raya(kelurahan mentangor, bencag lesung, bambu kuning, rejo sari, silang sakti,kulim)	50 unit	Rp. 875.000.000.00

Sumber dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Melihat tabel I.III rencana yang telah dibuat ditahun 2018 yang akan di realisasikan di tahun ini (2019) sebanyak 30 unit yang di rencanakan 50 unit pembangunan rumah layak huni, melalui program Bantuan Stimulasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPKRS)

Adapun fenomena yang penulis dapati dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka beberapa fenomena diantaranya;

1. Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan bantuan stimulasi rumah tidak layak huni, hal ini dapat dilihat dari jumlah pembangunan rumah yang sudah di rencanakan dengan jumlah rumah yang sudah dilaksanakan.
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat kurang mampu di kecamatan tenayan raya belum sesuai antara jumlah rumah yang telah dibangun dengan rencana yang telah di buat sebelumnya

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang **“Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman?
2. Apa saja faktor penghambat dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam merelalisasi program pembangunan rumah layak huni?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

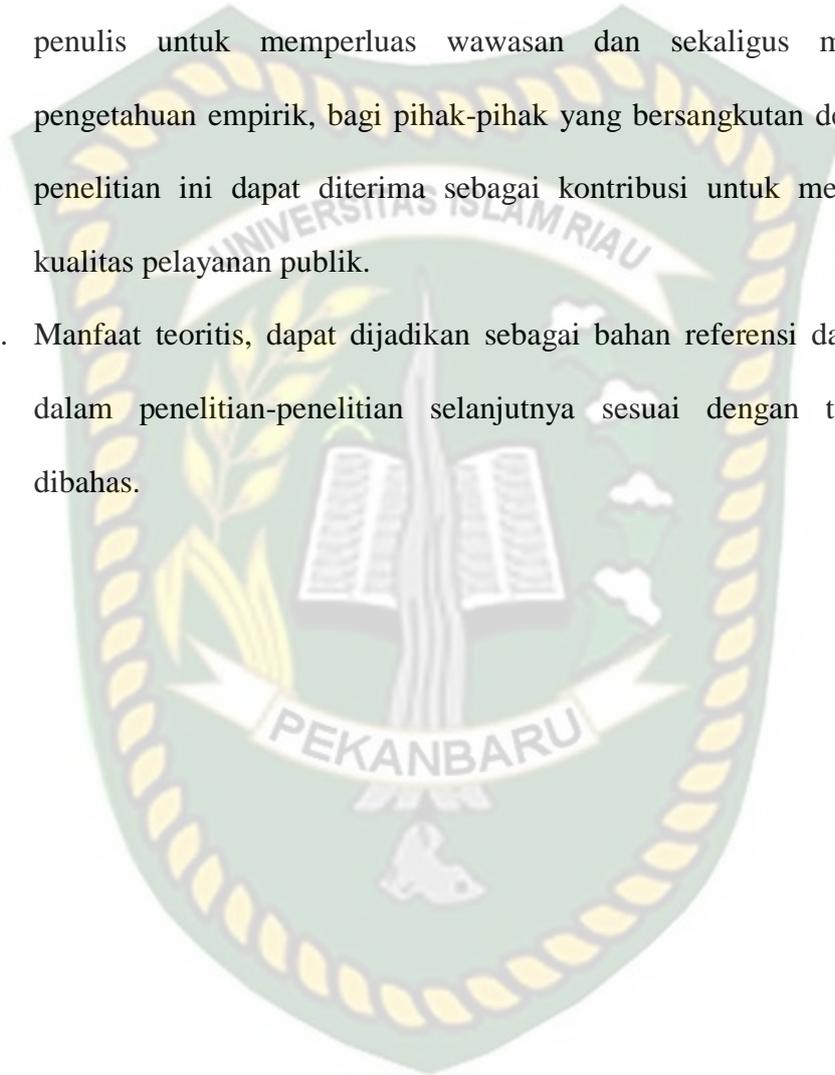
- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat akademis adapun peneitian ini diharapkan bermanfaat berguna bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota pekanbaru riau, sehingga dapat menjadi umpan balik (feedback) dalam perbaikan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Dalam Upaya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni Di Kota pekanbaru serta para pembaca dan bagi masyarakat semoga dapat bermanfaat.

- b. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat kepada penulis untuk memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik, bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan hasil penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian-penelitian selanjutnya sesuai dengan topik yang dibahas.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukkan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan teori dan konsep yang ada relevansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, untuk membantu pemecahan permasalahan yang penulis teliti.

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berasal dari Bahasa latin yaitu ad dan ministrare yang artinya pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa inggris disebut administration artinya to serve yaitu melayani dengan sebaik baiknya. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, ada beberapa pengertian administrasi menurut para ahli dalam Inu Kencana Syafie (2003)

Menurut Herbert A. Simon mengatakan administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Leonard B. White mengatakan administasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Sondang P. Siagian berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan

pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Guick administrasi adalah suatu system pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Menurut The Liang Gie administrasi segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena social, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern, eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi. Dalam Faried Ali (2011) administrasi adalah kerja sama manusia yang tidak saja di dasarkan pada pertimbangan rasio, tetapi juga atas dasar realitas empiric tentang esensi eksistensi manusia dalam pencapaian tujuan bersama.

Administrasi dalam arti sempit, menurut Soewarno Handyaningrat dalam andri feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015) mengatakan meliputi kegiatan catat-mencatat, surat- menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda yang

bersifat ketata usahaan. Administrasi dalam arti luas menurut The Liang Gie dalam Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015) mengatakan administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep organisasi

Keberadaan organisasi (organizing) sebenarnya setua sejarah peradaban manusia. Sepanjang hidupnya manusia telah menggabungkan diri dengan orang lain untuk mencapai tujuan Bersama. Namun tidak semua orang sadar bahwa mereka sebenarnya telah berorganisasi. Apa yang dikatakan orang tentang organisasi tidak ubahnya sebagai wadah untuk mencapai tujuan mereka yang di dalamnya terdapat norma norma yang harus dipedomani dan nilai yang perlu dipegang teguh.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi dan Hendry Andry 2015)

Menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana Syafii 2003) organisasi merupakan adalah segala bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan John D. Millet (dalam Inu Kencana Syafii 2003) mendefinisikan organisasi sebagai kerangka stuktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan Bersama.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafii 2003) organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. Chester L. Bernard (dalam Syafii 2003) mendefinisikan bahwa Organisasi adalah sebagai sebuah system tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2003) bahwa organisasi adalah sebagai suatu stuktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu system administrasi. Menurut Stoner (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015) organisasi adalah suatu pola hubungan orang-orang di bawah pengarahannya manajer (pimpinan) untuk mengejar tujuan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins, dalam bukunya Organization Theory, organisasi adalah suatu kesatuan social yang di koordinasikan secara sadar dengan batas yang relative dapat ditentukan. Dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi serupa oleh David R. Hampton dalam bukunya Management bahwa organisasi adalah suatu pengelompokan manusia yang bertahan lama dalam suatu system yang terstruktur dan berkembang, dimana usaha-usahanya yang terkoordinir di maksudkan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang dinamis (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015).

Paul Bertholeneus dalam bukunya An Outline of Public Administration, menyebutkan organisasi adalah susunan yang agak logis dari bagian-bagian yang

saling berhubungan untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bulat padu, sehingga kekuasaan dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Louis Allen dalam buku *Management and Organization* mengatakan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serta mewujudkan hubungan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dan efisien. Adapun G. R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pendapatnya tentang organisasi adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (dalam Sukarna 2011).

3. Konsep manajemen

Manajemen sudah ada sejak dulu, dimana sejak manusia memenuhi kebutuhannya melalui bantuan orang lain. Sehingga manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintahan, perusahaan, dan sebagainya.

Menurut Frederick W. Taylor maksud ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Menurut Olivier Sheldon manajemen adalah sebagai fungsi kajian

industry dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Menurut George Terry manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Menurut John D. Millet manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (dalam Inu Kencana Syafii 2003)

R.T Livingstone dalam buku *The Engeneering of Organization and Management* menyebutkan manajemen adalah mencapai tujuan dengan cara-cara yang terbaik, yaitu dengan pengeluaran waktu dan uang yang paling sedikit, biasanya dengan penggunaan fasilitas yang adasebaik-baiknya. Menurut John M. Pfiffner dalam buku *Public Administration* manajemen adalah bertalian dengan pembimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yangtelah ditetapkan sebelumnya.

Menurut John D. Millet dalam buku *Management in the Public service* manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mendapat suatu tujuan yang dikehendaki. Menurut Dwight Waldo dalam buku *Public Administration* manajemen ialah tindakan yang ditunjukkan untuk memperoleh kerja sama yang rational dalam suatu system administrasi.

Menurut G. R. Terry dalam buku *Principles of Management*, manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Menurut Harold Koontz and Cyril O'Donnell dalam buku *Principles of Management*, manajemen adalah pelaksanaan pekerjaan bersama-sama orang lain (dalam sukarna 2011)

Menurut John D. Millet mengatakan manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (siswanto 2005). Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi efektifnya tujuan organisasi. Menurut Hersey dan Blanchard manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (dalam siswanto 2005)

4. Pelaksanaan

menurut syafi'I pelaksanaan sudah menjadi barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen. Fungsi pelaksanaan menurut sukiawati, dkk dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain Abd roman menyimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti menupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau

berkerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Berdasarkan paparan diatas dapat dikatan bahwa fungsi pelaksanaan secara lebih teknis, maksudnya pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan semua agar anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasara agar sesuai dengan pencapaian dan usah-usaha organisasi.

Berkaitan dengan usaha-usaha organisasi dalam mencapai sasarannya jika dikaitkan dengan visi misi, tujuan, dan sasaran.

5. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan terjemahan dari kata policy. Kebijakan juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak. Kebijakan juga dapat berbentuk keputusan yang telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan yang berulang-ulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menuru Thomas R. Dye (1978:3) mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “ *is whatever governments choose to do not to do*” dikatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (objektifmnya) dan kebijakan itu harus meliputi kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

William Dunn mengatakan kebijakan public adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan badan atau kantor pemerintah (Darwin, 1995). Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah. Suatu keadaan yang diinginkan akan nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian penjabaran lebih lanjut yang semakin konkrit dan jelas amat diperlukan.

Dengan demikian kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian-pengertian mengenai sasaran yang diupayakan dan cara cara bagaimana tujuan itu harus dicapai.

Menurut Anderson (1979); kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan sesuatu masalah (a purposive course of problem or matter of concern).

Menurut PBB kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana.

Menurut KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Menurut Anderson; kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah.

Menurut mustofadidjaja kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran atau pun(unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

6. Pemerintah

Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/undang-undang diwilayah tertentu. Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan public yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan

Dalam arti luas pemerintah adalah semua aparatur negara eksekutif, legislative, yudikatif yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja.

Menurut Wilson (1903,572) Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau kelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran mereka, dengan memberikan perhatian pada urusan public.

Menurut suradinata pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negri ini, termasuk urusan public, teroterial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

7. Pembangunan

Menurut siagian (1994) pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa sedangkan ginanjar (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu proses perubahan kearah yang yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Apabila definisi sederhana diatas disimak seacara cermat akan muncul ke permukaan paling sedikit 7 ide pokok. *Pertama*; pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangununan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap tahap yang disati pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan, “bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan tahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua* ; pembangunan merupakan upaya yang

secara sadar ditetapkan sebagai suatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terhadap kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadic atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. *Ketiga*; pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan. *Keempat* rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan seperti negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam mengahapi tuntutan dalam situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada. *Kelima* pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian, perlu di ingatkan bahwa konsep modernitas tidak indentik dengan” cara hidup gaya barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang

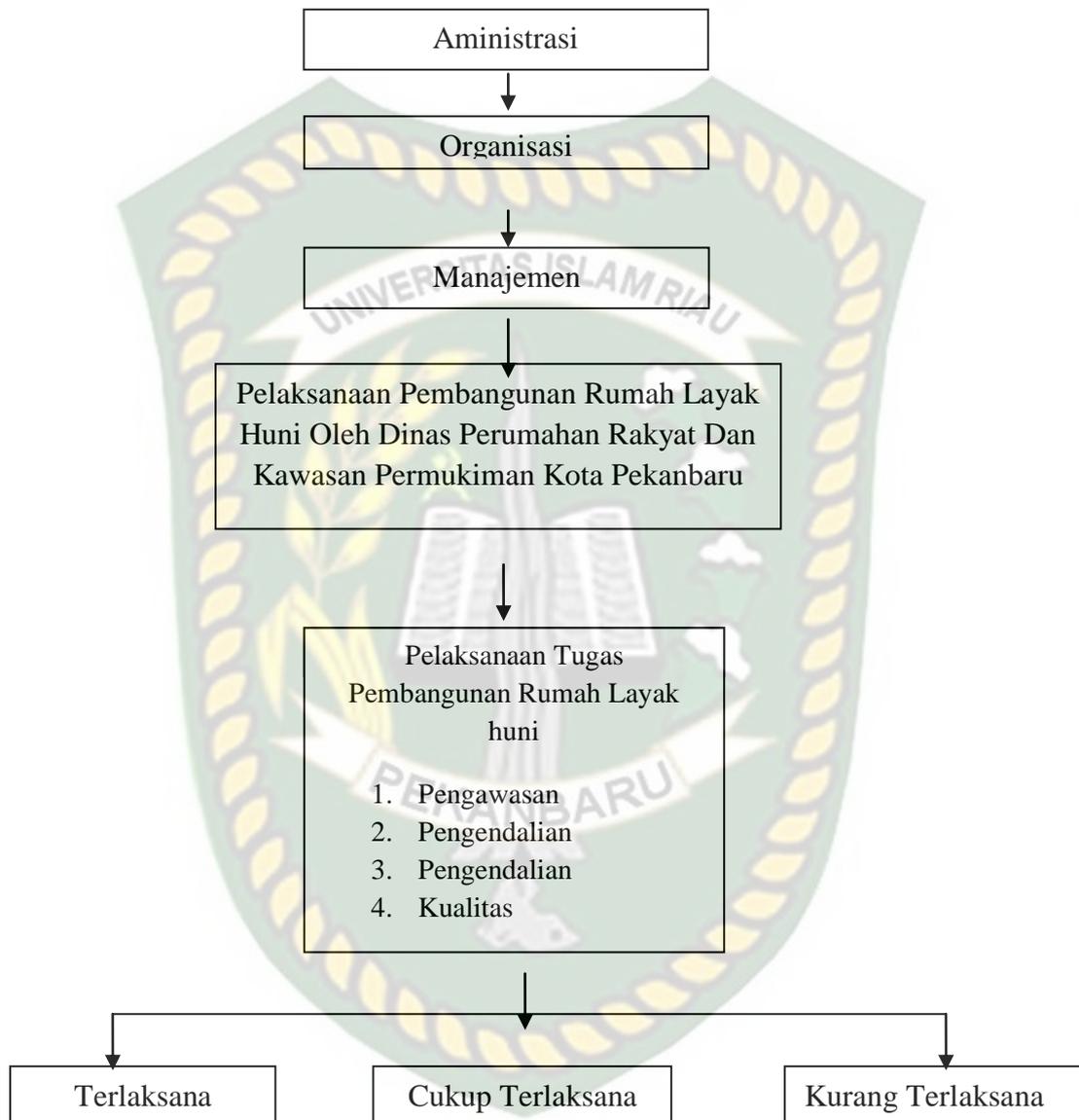
dipandang luhur oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek nilai tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan ditempuh. *Keenam* modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. *Ketujuh* semua hal yang telah disinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karna mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan kerangka pikir berbagai factor yang telah di identifikasikan sebagai hal yang penting yakni sebuah pemahaman dimana yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya atau sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan serta menjelaskan secara teoritis pertautan Antara variable yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru dilihat dari bagan sebagai berikut.

Gambar II.I kerangka pikir tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru.



Sumber; modifikasi penulis 2019

C. Konsep Operasional

Dengan konsep ini peneliti akan memberikan penafsiran yang mengaitkan pemikiran dengan analisa. Peneliti melaksanakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan sebelumnya, adapun konsep operasioanal tersebut Antara lain;

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama dua orang atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan Antara individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya.
3. Manajemen merupakan sebuah proses kasus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tindakan pengawasan, dan dilaksanakan untuk menetapkan dan mencaoai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sbelumnya.dengan jalan memanfaatkan unsur manusi dan sumber daya lainnya.
4. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau usaha dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasa diartikan sebagai penerapan.
5. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan terjemahan

dari kata policy. Kebijakan juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak. Kebijakan juga dapat berbentuk keputusan yang telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan yang berulang-ulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

6. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/undang-undang di wilayah tertentu. Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan public yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan
7. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya, Alexander (1994)
8. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan luas bangunan, serta kesehatan penghuni rumah.
9. Pengawasan merupakan upaya pemantauan secara terus-menerus untuk memahami bidang-bidang tertentu dari perencanaan yang sedang dijalankan.

10. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan.
11. Pengelolaan mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.
12. Kualitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran atau panduan angka lainnya.
13. Seksi pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi.
 - h. Pemantauan dan evaluasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - i. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memiliki criteria untuk mengukur keberhasilannya yaitu; pengawasan, pengendalian, pengelolaan, kualitas.
 - k. Pemantauan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
 - l. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- n. Perumusan dan pelaksanaan pembuatan laporan pengelolaan pembangunan.

D. Operasional Variable

Table II.I Variable Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variable	Indicator	Sub indicator	Penilaian
1	2	3	4	5
Pelaksanaan adalah kegiatan penerapan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya (abd rohman 2018;37)	Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni di kota pekanbaru	1.Pengawasan	a. melakukan kunjungan langsung	Terlaksana Cukup terlaksana
		2.pengendalian	b. melakukan pendataan	Kurang terlaksana
			c.menganalisis permasalahan RTLH	
		a.pemantauan	rumah tidak layak huni	Terlaksana Cukup terlaksana
		b.mengatur jadwal sosialisasi kepada masyarakat		Kurang terlaksana
		c. mengkoreksi rumah yang tidak		

Konsep	Variable	Indicator	Sub indicator	Penilaian
1	2	3	4	5
		3.pengelolaan	layak huni a.mengadakan sosialisasi tentang rumah yang layak huni (standar)	Terlaksana Cukup terlaksana
		4.kualitas	b.menentukan strategi pembangunan rumah tidak layak huni c.melakukan musrenbang. a.bantuan rumah swadaya b.memberi bantuan finansial c. peningkatan rumah tidak layak huni	Kurang terlaksana Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : modifikasi penulis 2019

E. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indicator dalam melaksanakan pembangunan rumah layak huni dikota pekabaru diklarifikasikan dalam 3 kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana, sedangkan untuk pengukurannya menggunakan teknik pengukuran *skala lingker*, yang menurut sugiono adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Skala lingker yaitu dengan memberikan nilai skor pada setiap kategori yang menjadi alternative jawaban terlaksana diberi nilai skor 3, cukup terlaksana skor 2, kurang terlaksana skor 1.

Dari sejumlah item pertanyaan yang diajukan kemudian dicari interval, untuk menentukan interval kriteria penilaian dengan cara nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah setelah itu dibagi dengan jumlah kategori ukuran, selanjutnya hasil pembagian dikurangi 1, rumusnya sebagai berikut :

1. Pengukuran Variabel

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Tertinggi = 3 x 12 x 30 = 1.080

Total Skor Terendah = 1 x 12 x 30 = 360

$$\text{Interval} = \frac{1.080 - 360 - 1}{3} = 240$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap Variabel dari pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru dengan responden 30 orang dan 12 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 1.080 dan untuk skor terendah 360 dengan jarak interval 240. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru pada interval nilai skor 1.080-840.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 839-599

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 598-358.

2. Pengukuran Indikator

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Tertinggi = $3 \times 4 \times 30 = 360$

Total Skor Terendah = $1 \times 4 \times 30 = 120$

$$\text{Interval} = \frac{360 - 120 - 1}{3} = 80$$

Untuk mengetahui masing-masing penilaian atas variabel tentang pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru yang terdiri dari 4 indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengawasan, diajukan 3 pertanyaan dengan 30 responden dengan skor pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru tertinggi 360 dan skor terendah 120 dengan interval skor 180 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 360-280.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah

layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 279-199.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 198-118.

2. Pengendalian, diajukan 3 pertanyaan dengan 30 responden dengan skor pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru tertinggi 360 dan skor terendah 120 dengan interval skor 80 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 360-280.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 279-199.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator

pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 298-118.

3. Pengelolaan, diajukan 3 pertanyaan dengan 30 responden dengan skor pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru tertinggi 360 dan skor terendah 120 dengan interval skor 80 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 360-280.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 279-199.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 198-118.

4. Kualitas, diajukan 3 pertanyaan dengan 30 responden dengan skor pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru tertinggi 360 dan skor terendah 120 dengan interval skor 80 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 360-280.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 279-199.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan rumah layak huni oleh pemerintah dikota pekanbaru berada pada interval nilai skor 198-118.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Kemudian untuk metode penelitian ini digunakan kuantitatif. Metode kuantitatif menurut sugiono (2003) dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan filsafat positivme, dan digunakan untuk penelitian populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota pekanbaru provinsi riau . alasan penulis melakukan penelitian dilokasi karna penulis menemukan masalah di Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pembangunan rumah layak huni di kota pekanbaru.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiono, 2012; 90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau

tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (silalahi, 2012;254)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (sugiono,2011; 91)

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada table III.I dan tabel III.II sebagai berikut

Table III.I : jumlah populasi dan sampel penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembanguna rumah layak huni dikota pekanbaru.

No	Jenis responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Seksi penyediaan dan pelaksanaan	1	1	100%
2	Staff	1	1	100%
Jumlah		2	2	100%

Sumber olahan penulis 2019

Tabel III.II jumlah populasi dan sampel penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembanguna rumah layak huni dikota pekanbaru.

No	Jenis Responde	Populasi	Sampel	Persentase
1	Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni	30	30	100%
JUMLAH		30	30	100%

Sumber olahan penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparaturnya pemerintah adalah memakai *purpose sampling* yaitu penulis menentukan sendiri populasinya yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kepala dinas sebagai key informan dan yang jelas pada intinya mereka yang terpilih dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni digunakan *teknik incidental sampling*, yaitu pemilihan sampel pada waktu tertentu dilokasi penelitian dengan alasan banyaknya jumlah responden sehingga hanya masyarakat yang tidak memiliki rumah layak saja di jadikan sampel.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni dikota pekanbaru

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan yang relevan dapat menunjang objek penelitian ini meliputi buku-buku kepustakaan, arsip, serta peraturan ang bersangkutan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut;

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan melihat langsung fenomena yang tumbuh di lingkungan sosial (Sugiono;145)

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab (Sugiono 2016;137)

3. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan (Sugiono 2016;142).

4. Dokumentasi

Merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto, dokumen-dokumen yang diperoleh selama penulis melakukan penelitian (Sugiono2016;137)

G. Teknik analisis data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan (Moleong,20015;103)

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur pengurutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dan

membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian (moleong,2005;203)

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk analisis data dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta- fakta dilapangan kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ lintang utara dan $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ bujur timur, berdasarkan PERWAKO Pekanbaru nomor 19 tahun 1987 (7 September 1987) daerah kota Pekanbaru di perluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km², dari 12 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil pengukuran atau pemetaan dilapangan oleh badan nasional tingkat I Riau, maka luas kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau. Kota ini salah satu pusat ekonomi terbesar dibagian timur pulau Sumatra, yang termasuk dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari pasar (pekan) yang didirikan oleh pedagang dari Minang Kabau Ditepi sungai Siak pada abad 18. Hari jadi kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah Dewan Menteri Kesultanan Siak yang terdiri dari datuk 4 suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar). Kota Pekanbaru berkembang dengan berkembangnya industri terutama berkaitan dengan minyak bumi dan otonomi daerah.

Secara umum kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah seperti berikut; sebelah utara kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar, sebelah selatan kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, sebelah timur kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, sebelah barat kota Pekanbaru berbatasan dengan

kabupaten kampar. Pada tahun 2014 pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terpadat dipulau Sumatra, setelah medan dan Palembang, laju pertumbuhan ekonomi kota pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong lajupertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat. Menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.suku minang kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai professional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan bahasa minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota pekanbaru, selain bahasa Indonesia.selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, jawa, tiongha, dan batak. Perpindahan ibu kota provinsi riau dari tanjung pinang ke pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota, namun sejak tahun 2001 hegomoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya provinsi kepulauan riau dari pemekaran provinsi riau

Masyarakat tiongha pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi selain berasal dari pekanbaru sendiri, masyarakat tiongha yang bermukim dipekanbaru banyak yang berasal dar wilayah pesisir provinsi riau, seperti dari selat panjang , bengkalis dan bagan siapi api, selain itu masyarakat tiongha dari medan dan padang juga banyak dijumpai dipekanbaru terutama setelah era millennium dikarekan perekonomian pekanbary yang tumbuh sangat pesat hingga sekarang.

B. Profil Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru berlokasi di jalan datuk setia maharaja nomor 3 kecamatan bukit raya notelp 0761-7873955 email” kode pos 28281 kota pekanbaru.

Dinas perumahan rakyat dan kawasan perkumukiman kota pekanbaru sebagaimana tertuang di perda kota pekanbaru nomor 9 tahun 2016 tentang susunan dan perangkat kota pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam pemerintahan untuk membantu walikota pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, dinas perkim berdasarkan perwako nomor 95 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan.

Visi dan misi perumahan rakyat dan kawasan permukiman

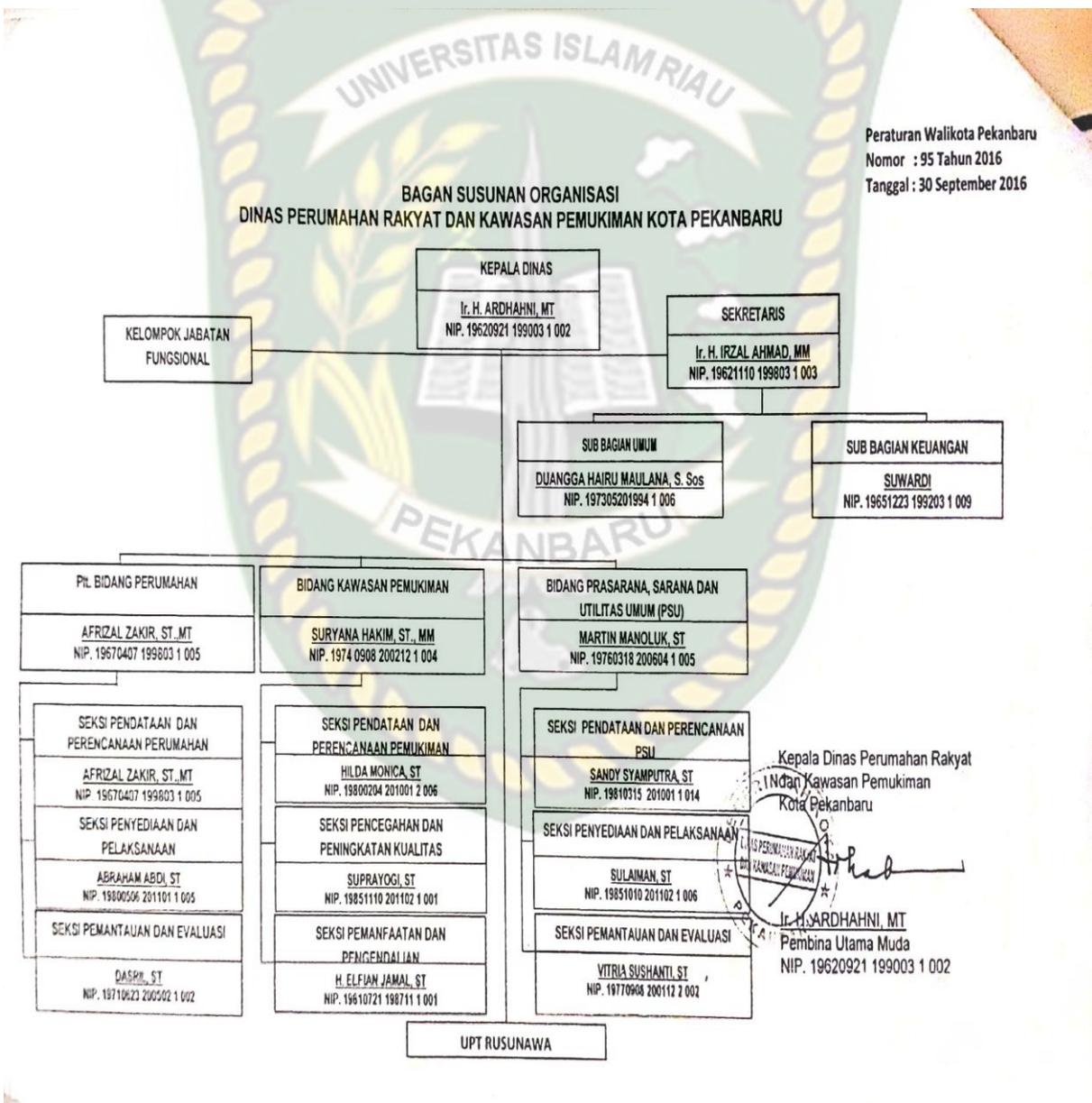
1. Visi

Terwujudnya infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang handal dan berkelanjutan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal.
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman

- c. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian kawasan kumun perkotaan.
- d. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif didalam penyelenggara perumahan dan permukiman.
- e. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung sarana dan prasaranan dan utilitas umum.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data hasil penelitian yang telah dilakukan berupa hasil kusioner tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, serta melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada sesuai dengan indicator variabel penelitian.

A. Identitas Responden

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengkajian tentang bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan demikian untuk memenuhi data yang akan dianalisa sebagai bahan informasi pelaksanaan tugas pembangunan kepada rumah yang tidak layak huni tersebut maka perlu mencari data yang akurat dari responden yang mengetahui tentang program pembangunan rumah tidak layak huni sehingga peneliti membagi criteria responden sebagai berikut;

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya serta dalam mengisi kusioner dan wawancara yang peneliti berikan, untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin pada masyarakat.

Tabel V.I ; Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

No	Kelompok responden	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	
1	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	3	-	3
2	Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni	9	21	30
Jumlah		12	21	33
Persentase		36%	64%	100%

Sumber Olahan Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 33 responden sebanyak 12 orang laki-laki (36%) dan perempuan 21 (64%).

2. Berdsarkan Usia

Berdasarkan hasil kusioner tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang telah di sebarakan ke seluruh responden masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

Usia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada semua orang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, selain itu usia juga berpengaruh pada produktvitas kerja, berdasarkan angket ataupun kusioner yang disebarakan kepada responden maka diketahui bahwa responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

V.II : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Usia Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni Dikota Pekanbaru.

No	Usia	Kelompok responden		Jumlah	Persentase
		Dinas Perkim	Masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni		
1	21-30 Tahun	-	-	-	-
2	31-40 Tahun	2 Orang	-	2	6,25%
3	41-50 Tahun	-	22 Orang	22	68%
4	>50 Tahun	-	8 Orang	8	25%
Jumlah		30 Orang	3 Orang	32	100%

Sumber Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel V.II diatas dapat diketahui bahwa ada 1 orang pegawai atau pelaksana kegiatan pembangunan yang berada pada rentang usia 21-30 tahun tidak ada dan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni juga tidak ada, sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada di rentang usia 31-40 tahun ada 2 orang dari pegawai dinas Perkim sehingga jumlah responden secara keseluruhan 6,25%

Selanjutnya pada rentang usia 41-50 adalah 22 orang sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada di rentang usia 41-50 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 68%, dan terakhir ada 1 orang dari dinas Perkim, dan untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni ada 8 orang sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada pada rentang usia > 50 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 25%.

3. Pendidikan Responden

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikirnya seseorang dalam berbuat dan berperilaku dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain terhadap dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden, semakin tinggi ilmu pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang disajikan peneliti dalam kusioner penelitian yang telah dilakukan, dari hasil tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. maka dapat diketahui bahwa tingkatan pendidikan responden yang masuk ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel V.III Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekanbaru.

No	Pendidikan	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Dinas Perkim	Masyarakat Yang Memiliki Rumah Tidak Layak Huni		
1	SD/ Sederajat	-	-17	17	51%
2	SMP/ Sederajat	-	12	12	36%
3	SMA/Sederajat	-	1		3%
4	S 1	2	-	2	6%
5	S2	-	-	=	-
Jumlah		3	30	32	100%

Sumber olahan peneliti 2019

Dari tabel V.III dapat dilihat bahwa ada 17 orang masyarakat yang memiliki rumah tidak layak hunu persentase 51% berpendidikan SD/Sederajat kemudian pada SMP/Sederajat ada 12 orang dari masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dengan persentase 36%, selanjunya pada tingkat SMA/Sederajat yaitu ada 1 orang dari masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni dengan persentase 3%, selajutnya pada tinkat S1 ada 2 orang dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan jumlah persentase 6%.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari perguruan tertinggi sampai terendah, namun jika dilihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman terbilang memadai untuk kategori terpejar dan terdidik. Oleh karena itu diharapkan para pegawai dapat bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya afar berjalan dengan efekti dan efisien serta tanggung jawab.

B. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dimaksud dalam penelitian ini yakni dilihat dari beberapa indicator penelitian yang sesuai rencana penelitian dalam peta pemikiran penelitian, selanjutnya dibahas sebagai berikut;

1. Pengawasan

Seksi penyediaan dan rehabilitasi perumahan berperan sebagai pemantau (pengawas), maksudnya tugas seksi penyediaan mempengaruhi suatu keberhasilan kinerja. Pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, dalam kapasitas ini harus disimpan dan dipelihara sebaik-baiknya karena informasi merupakan data yang sangat berharga. Dengan demikian seksi penyediaan dan rehabilitasi perumahan harus bekerja ekstra seperti sering memperhatikan daerah-daerah yang jarang tersentuh ataupun daerah yang ada di sudut sudut kota. Pengawasan selalu diartikan sebagai keseluruhan upaya organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi serta personel dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang memanfaatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya lainnya berlangsung sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

Berikut tanggapan dari 32 responden yang mengisi kusioner dan wawancara mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel V.IV Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Teanayan Raya Kota Pekanbaru.

No	Item pertanyaan	Jawaban responden			Total
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Melakukan pendataan ke RTLH	18	12	-	30
2	Melakukan kunjungan langsung ke lokasi	17	8	5	30
3	Menganalisis permasalahan RTLH	5	9	16	30
Jumlah		40	29	21	90
Skor		120	58	21	199
Kategori		Cukup terlaksana			

Sumber olahah peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.IV dapat dijelaskan bahwa klasifikasi tanggapan responden terhadap indikator pengawasan pada penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Teanayan Raya Kota Pekanbaru diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 mengenai bagaimana melaksanakan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yakni pada kategori terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 18 orang yang menyatakan terlaksana dengan alasan bahwa dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PERKIM) Ada melakukan pendataan ke Rumah Tidak Layak Huni. Jawaban responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 12 orang dengan alasan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman hanya melakukan pendataan rumah tidak layak huni tanpa meraka menginfokan ke masyarakat rumah

mana yang masuk ke criteria tidak layak huni versi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai kunjungan langsung ke lokasi dapat kita lihat 17 responden yang menyatakan terlaksana dengan alasan kegiatan kunjungan langsung ke lokasi yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan jawaban untuk cukup terlaksana berjumlah 8 orang responden dengan alasan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan kunjungan hanya sekali setahun, dan yang menjawab kurang terlaksana ada 5 orang responden dengan alasan dinas perumahan rakyat dan kawasan perumahan rakyat hanya melakukan kunjungan tidak keseluruhan rumah yang tidak layak huni khususnya di kecamatan tenayan raya.

Untuk item pertanyaan ketiga mengenai menganalisis permasalahan rumah tidak layak huni dapat kita lihat bahwa 5 responden menyatakan terlaksana dengan alasan dapat dilihat dari hasil yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan permukiman dalam menganalisis permasalahan pembangunan rumah tidak layak huni. Dan 9 responden yang menyatakan cukup terlaksana dengan alasan analisis permasalahan yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan permukiman sudah dilakukan meskipun kurang maksimal dan 16 responden menjawab kurang terlaksana dengan alasan analisis yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum menemukan jawaban atas permasalahan rumah tidak layak huni. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indicator pengawasan dapat dikatakan cukup terlaksana yakni dengan berada di rentang skor 199 yang berada pada kategori **cukup terlaksana**, yakni rata-rata responden menyatakan

bahwasannya pengawasan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal seperti adanya membandingkan serta menilai hasil program pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu.

Dan hasil dari wawancara dengan ibu Yati selaku masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni mengenai pengawasan yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman bisa dibilang cukup terlaksana sebab.

”untuk yang melakukan kunjungan langsung, melakukan pendataan, dan menganalisis permasalahan yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman ibu yati sudah puas dengan kinerja dinas tetapi yang disayangkan kenapa hanya sekali setahun mereka melakukan agenda tersebut padahal salah satu fungsi pengawasan ialah pencegahan” (yati, 22 Oktober 2019)

Berdasarkan pernyataan ibu yati dapat dipahami bahwa pengawasan itu sangat penting di lakukan karna efeknya yang positif, tetapi sangat di sayangkan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman hanya setahun sekali mengawasi pertumbuhan rumah tidak layak huni di kota pekanbaru, yang mengakibatkan rumah tidak layak huni sangat sulit untuk di kurangi.

Dari hasil wawancara dari bapak abraham abdi S.T dan bapak tama selaku seksi penyediaan dan pelaksanaan mengatakan.

“dalam pengawasan langsung yang telah di lakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kami sudah melakukannya dengan maksimal sesuai dengan SOP yang telah di tentukan. Dalam pengawasan ini kami mempunyai tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang terlebih dahulu melakukan pendataan di setiap kecamatan yang ada di kota pekanbaru, hasil laporang yang berdasarkan dari lapangan kami membaca hasil laporanya setelah itu baru kami melakukan verifikasi rumah mana yang memenuhi criteria tidak layak huni untuk dilakukan perbaikan kualitas”(tama dan abdi araham 20 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk pengawasan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah melakukannya dengan maksimal.

2. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Pengendalian berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas dilapangan sesuai dengan yang direncanakan Abd. Rohman (2018:39).

Berikut tanggapan dari 30 responden yang mengisi angket atau kuisisioner mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni diKecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.V Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengendalian Pada Penelitian Tetang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pebangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

No	Item pertanyaan	Jawaban responden			Total
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Pemantauan Rumah Tidak Layak Huni	15	10	5	30
2	Melakukan Jadwal Sosialisasi	1	14	15	30
3	Mengkoreksi Rumah Tidak Layak Huni Sesuai Kriteria	9	14	17	30
Jumlah		25	38	32	90
Skor		75	76	32	183
Kategori		Kurang terlaksana			

Berdasarkan tabel di atas V.V diatas tentang tanggapan responden terhadap indikator pengendalian pada penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni diKecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru diketahui bahwa pada item pertanyaan 1 Pemantauan Rumah Tidak Layak Huni responden yang menjawab terlaksana berjumlah 15 orang responden, dengan alasan bahwa selaku pelaksana pembangunan rumah layak huni Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman telah melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya rumah yang tidak layak huni. Yang menjawab pada kategori cukup terlaksana berjumlah 10 orang responden dengan alasan sudah terlaksana namun belum maksimal dalam pemantauan tumbuh kembangnya rumah yang tidak layak huni. Dan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 5 orang dengan alasan para pemilik rumah tidak layak huni tidak mengetahui orang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pemantauan.

Untuk item pertanyaan 2 Melakukan Jadwal Sosialisasi yang menjawab terlaksana 1 orang dengan alasan ia mengetahui sendiri karena saat itu berada dikantor camat. Dan yang menjawab cukup terlaksana mengenai Melakukan Jadwal Sosialisasi 14 orang dengan alasan sudah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni tidak mengetahui kapan jadwal sosialisasi tersebut.dan yang menjawab kurang terlaksana ada 15 orang dengan alasan memang tidak ada mengatur jadwal sosialisasi terhadap masyarakat khususnya kecamatan tenayan raya.

Untuk item pertanyaan 3 Mengkoreksi Rumah Tidak Layak Huni Sesuai Kriteria yang menjawab terlaksana 9 orang yang artinya Dinas melakukan tugasnya

sesuai dengan tupoksinya. Dan untuk responden yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 14 orang responden yang artinya sudah terlaksana namun belum maksimal atau belum rutin. Dan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 17 responden, dengan alasan belum terlaksana dengan baik karna orang dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman hanya melakukan pemantauan saja dan tidak mengkoreksi rumah-rumah mana saja yang masuk ke criteria rumah tidak layak huni. Dengan demikian melalui dari beberapa item penilaian yang dinilai responden dapat diambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan skor **183** yang berada di kategori **Kurang Terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bawasannya pengendalian sudah dilaksanakan tapi belum maksimal.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abraham Abdi S.T dan bapak Tama sebagai kepala seksi penyediaan perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Mengenai pengendalian yang mereka laksanakan kepada rumah tidak layak huni dapat dilihat dari yang dilaksanakan oleh seksi penyediaan dan pelaksanaan.

“pemantauan yang kami laksanakan (seksi penyediaan perumahan) telah kami laksanakan, kami melakukan pemantauan rumah tidak layak huni ini sudah berusaha bekerja secara maksimal namun karena satu dan hal lainnya tumbuh kembang rumah tidak layak huni lebih cepat menambah atau meningkat dari yang kami kira.”(tama dan abdi araham 20 Oktober 2019).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa untuk pemantauan (pengendalian) seksi penyediaan perumahan sudah melakukan tugas tetapi mereka tidak bisa mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni dengan alasan yang kurang jelas.

Dari pernyataan ibu yati selaku pemilik rumah yang layak huni mengenai pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kurang terlaksana dengan baik.

“ untuk pemantauan, mengatur jadwal ke kecamatan, dan mengkoreksi yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kurang terlaksana dengan baik karna dari 3 pernyataan diatas hanya ada beberapa yang dilakukan oleh dinas tersebut yang salah satunya pemantauan, karna pemantaun yang mereka lakukan hanya berkeliling saja dan jadwal kapan mereka akan melakukan pemantauan saya (yati) tidak mengetahuinya dan mengkoreksi rumah mana yang layak tidak huni yang hanya di ketahui mereka saja (dinas perkim)”(22 oktober 2019)

Dari pernyataan ibu yati diatas hanya pemantauan yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang sudah maksimal. Namun tidak untuk mengatur jadwal sosialisasi dan mengkoreksi rumah tidak layak huni.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan untuk indicator pengendalian disini peneliti melihat masih kurang terlaksana, karna pengendalian yang dilaksanakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum terlaksana dengan baik malah kurang terlaksana jika di ukur dari scoring yang telah di tentukan.

3. Pengelolaan

Pengelolaan mengadung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah di rencanakan sebelumnya. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimandapat dilihat di tabel bawah ini;

Tabel V.VI Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengelolaan Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Item pertanyaan	Jawaban responden			Total
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Mengadakan sosialisasi	6	12	12	30
2	Strategi terhadap pembangunan RTLH	5	12	13	30
3	Musrembag kepada masyarakat	6	15	9	30
Jumlah		17	39	32	90
Skor		51	58	34	143
Kategori		Kurang terlaksana			

Berdasarkan tabel V.VI diatas untuk item pertanyaan 1 mengenai mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dapat kita lihat bahwa 6 responden menyatakan terlaksana, dan yang menyatakan cukup terlaksana ada 12 responden dengan alasan sosialisasi yang diadakan oleh dinas perumahan ralyat dan kawasan permukiman sudah dilakukan meskipun tidak maksimal. Dan yang menyatakan kurang terlaksana ada 12 responden yang artinya sudah terlaksana namun belum baik.

Untuk item pertanyaan kedua mengenai perumusan strategi terhadap pembangunan RTLH menyatakan terlaksana ada 5 responden, dan yang mengatakan cukup terlaksana ada 12 responden, dengan alasan pernah dilakukan artinya belum maksimal, dan yang menjawab kurang terlaksana 13 responden yang artinya sudah terlaksana namun belum maksimal.

Untuk item pertanyaan ke 3 mengadakan musrembang kepada masyarakat yang menyatakan terlaksana ada 6 orang , dan yang menyatakan cukup terlaksana ada 15 responden dengan alasan karna hasil musrenbang yang dilakukan dinas perumahan

rakyat dan kawasan permukiman kepada masyarakat yg tidak memiliki rumah layak huni dapat apresiasi oleh masyarakat tersebut.

Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden dapat diambil kesimpulan bawasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan item **143** yang berada pada kategori **kurang terlaksana**. yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya sudah dilakukan tetapi belum maksimal.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abraham Abdi S.T dan Tama sebagai seksi penyediaan dan pelaksanaan mengenai perumusan strategi, mengadakan musrenbang, mengadakan sosialisasi dibawah ini adalah;

“kami selaku pelaksana berusaha bekerja semaksimal mungkin agar kebijakan pemerintah dan program yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak terkait sehingga menciptakan kota yang bersih”(20 oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan ibu yati sebagai salah satu pemilik rumah tidak layak huni dan mewakili responden lainnya mengatakan kurang terlaksana sebab;

“ dari item penilaian yang mengadakan sosialisasi rumah yang layak huni (standar) dinas terkait tidak melakukannya ke kelurahan kami (tenayan raya)tapi ntah di kelurahan lain saya tidak mengetahuinya (yati), dan melakukan musrenbang kami sangat berharap dan meminta petugas dinas yang ada saat sosialisasi memohon pelaksanaan pembangunan rumah yang layak di banyakkan targetnya karna masoh banyak disini rumah rumah yang perlu perhatian pemerintah kota pekanbaru, dan perumusan stregi dinas belum maksimal menjalankannya karna renca tidak sesuia dengan realitanya”(22 oktober 2019)

Berdasarkan pernyataan ibu yati diatas dapat diketahui bahwa dinas terkait harus lebih memperhatikan lagi sudut-sudut kota harus sering di perhatikan.

4. Kualitas

Kualitas juga merupakan salah satu kunci sukses dalam menanggapi proses pembangunan rumah layak huni, dengan demikian sebuah lembaga harus menjaga dan menjamin bahan material yang di beli untuk membangun rumah yang layak.

Berikut ini peneliti sajikan tanggapan responden mengenai indikator kualitas;

Tabel V.VII Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kualitas Pada Penelitian Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Item pertanyaan	Jawaban responden			Total
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Memberikan rumah layak huni	-	20	10	30
2	Melakukan bantuan finansial	2	19	9	30
3	Melakukan peningkatan bangunan	13	17	-	30
Jumlah		21	39	20	80
Skor		63	98	20	181
Kategori		Kurang terlaksana			

Sumber olahan peneliti 2019

Berdasarkan tabel V.VII diatas untuk item pertanyaan 1 mengenai pemberian rumah layak huni dapat kita lihat yang mengatakan cukup terlaksana ada 20 orang responden dengan alasan dinas tidak ada memberikan rumah mereka hanya merenofasi (peningkatan kualitas) dan yang menyatakan kurang terlaksana ada 10 orang responden dengan alasan karena pemberian rumah layak huni ini adanya di kelurahan lain tidak di keluraha tenayan raya.

Untuk item pertanyaan ke 2 mengenai bantuan financial yang menyatakan terlaksana ada 2 orang dengan alasan mereka menerima bantuan apa yang dibutuhkan pada rumahnya sendiri seperti seng dll, serta memberikan uang. Dan yang mengatakan cukup terlaksana ada 19 orang responden yang artinya dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sudah melaksanakannya tetapi belum maksimal, dan yang mengatakan kurang terlaksana ada 9 orang responden dengan alasan tidak pernah mengetahui dan menerima.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai peningkatan kualitas rumah yang menyatakan terlaksana ada 13 orang responden dengan alasan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memang melakukan renovasi (peningkatan kualitas) tidak ada melakun pemberian perumahan khususnya di kecamatan tenayan raya. Dan yang menjawab cukup terlaksana ada 17 orang responden dengan alasan peningkatan kualitas sudah ada dilakukan tetapi kurang maksimal saja, karna ada rumah yang tidak layak huni di kelilingi rumah yang sudah di renovasi oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden dapat diambil kesimpulan bawasannya tanggapan responden terhadap item-item pernyataan dengan skor **181** yang berada pada kategori **kurang terlaksana** yakni rata rata responden menyatakan bawasannya peningkata kualitas sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal

Dari hasil wawancara dengan bapak Abraham Abdi S.T dan tama sebagai seksi penyediaan dan pelaksanaan mengatan mengenai indicator kualitas yang ada

beberapa pertanyaan memberikan rumah, memberi bantuan financial, meingkatkan kualitas rumah;

“kalau soal pemberian rumah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum memberikan ke kecamatan tenayan raya dengan alasan mereka belum ada yang memenuhi criteria dalam pemberian tetapi dalam peningkan kualitas rumah kami (dinas perkim) sudah berusaha semaksimal mungkin terutama di kecamatan tenayan raya, tetapi jumlah yang kami tawarkan ke kantor walikota tidak sesuai dengan yang kami ajukan tapi kami setiap tahunnya memasukan kecamatan tenayan raya ke rencana kegiatan pembangunan.soal rumah yang belum dilakukan peningkatan kualitas karna mungkin dari segi tidak layak masuk ke criteria tetapi di samping itu masih ada penilaian seperti, rusak ringan, kerusakan sedang, kerusakan berat, mereka lah prioritas kami dalam melakukan peningkatan rumah ini. Meskipun dana yang diberikan oleh penerima tidak banyak setidaknya mampu memberikan bantuan ntah bisa memperbaiki dinding yang dulunya kayu sudah bisa diganti dengan tembok.(20 oktober 2019).

Dari pertanyaan diatas dapat diketahui bahwa dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi mereka hanya mampu melakukan itu saja.

Dan hasil wawancara dari ibu yati selaku salah satu pemilik rumah tidak layak huni dan mewakili responden lainnya mengenai pemberian rumah, memberikan bantuan financial, dan melakukan peningkatan kualitas yang dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

“ pemberian rumah dengan percuma tidak ada setau ibu disini ntah di kecamatan lain ya, peningkatan kualitas rumah sudah ada dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukin ya gitu tetapi masih banyak juga yang belum mendapatkan bantuan padahal di RT sini saja ada kurang lebih 10 rumah yang perlu perhatian pemerintah, saya sendiri sudah mengajukan 3 tahun lalu tetapi tidak ada tanggapan atau hasil dari pengajuan saya.

Dari pernyataan diatas maka bisa dilihat masyarakat yang belum menerima rumah bantuan ingin sekali di beri kepastiam dari pelaksana.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan untuk indikator peningkatan kualitas rumah yang dilaksanakan oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kurang terlaksana dengan baik sebab dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman tidak melakukan peningkatan kualitas dengan semestinya

Untuk mengetahui bagaimana rekapitulasi dari 30 responden yang telah peneliti buat melalui kusioner yang diberikan kepada responden terhadap pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sebagai berikut.

Tabel V.VIII Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

No	Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang terlaksana	Skor	Kategori	
1	Pengawasan	120	58	21	199	Cukup Terlaksana	
2	Pengendalian	75	76	32	183	Kurang Terlaksana	
3	Pengelolaan	51	58	34	143	Kurang terlaksana	
4	Kualitas	63	98	20	181	Kurang Terlaksana	
Jumlah		706					
Kategori		Cukup Terlaksana					

Sumber olahan peneliti 2019

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden terhadap penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Pembanguana Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk indikator pengawasan sebesar 199 skor , untuk indikator pengendalian sebesar 183, untuk indikator pengelolaan sebesar 143 skor, dan untuk inkator kualitas sebesar 181 skor.total keseluruhan responden pada

penelitian ini sebanyak 30 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini berada kategori **Cukup Terlaksana**.

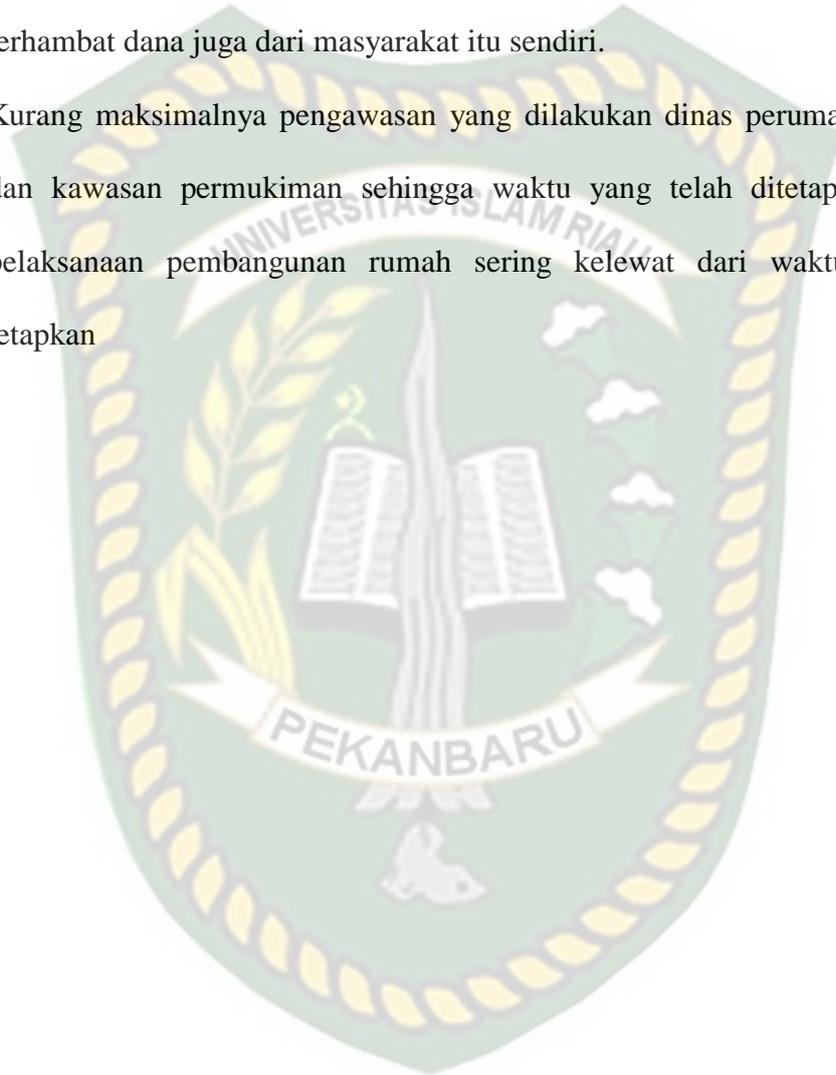
Dari data dan penjas diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Cukup terlaksana artinya pelaksanaan pembangunan rumah layak huni masih perlu ditingkatkan lagi.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak ada satu pun yang berjalan dengan lancar dan mulus meskipun sudah mencapai target ataupun sasarnya. Akan tetapi besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya pasti mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka akan melahirkan kebijakn kebijakan yang baru dalam hal pembangunan pemberdayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pelaksanaan bantuan rumah layak huni di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru 2019 masih mengalami kendala-kendalam dalam proses pencapaian pemerataan maksiamal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis akan menjelaskan secara umum berbagai kendala-kendala yang ada ataupun pernah terjadi dalam proses pelaksanaan bantuan RLH;

1. Pada kegiatan pembangunan rumah layak huni ada beberapa masalah seperti bahan-bahan seperti semen, pasir, batu, dan seng sangat mahal dengan buget RP.17.500.000 per-rumah dengan begitu ada sebagian rumah yang masih belum selesai 100% bahkan mengambang.

2. Dalam pencapaian target yang telah di buat di tahun sebelum pelaksanaan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman menemui masalah yang mana ada pemutusan sepihak dari masyarakat penerima dengan begitu dinas Perkim tidak bisa mengerjakan kegitannya tersebut sukses 100% selain terhambat dana juga dari masyarakat itu sendiri.
3. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sehingga waktu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan rumah sering kelewat dari waktu yang di tetapkan



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Kebijakan Perintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada bab ini di kemukakan beberapa kesimpulan peneliti dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait khususnya pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru.

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru merupakan kegiatan terencana dan terarah dari pemerintah kota pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan rumah layak huni dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dari hasil penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan indicator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pada tabel V.VIII Raya Kota Pekanbaru untuk indicator pengawasan sebesar 199 skor , untuk indicator pengendalian sebesar 183, untuk indicator pengelolaan sebesar 143 skor, dan untuk inkator kualitas sebesar 181 skor.total keseluruhan responden pada penetician ini sebanyak 30 orang. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini berada kategori **Cukup Terlaksana**.

2. Walaupun pelaksanaan pembangunan rumah layak huni cukup terlaksana, namun masih terdapat berbagai hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut;
 - a. Kurang maksimalnya pelaksanaan musyawarah yang merupakan pertemuan masyarakat sebagai ajang sosialisasi, dalam hal ini aparatur sipil negara harus mampu memaksimalkan lagi supaya pihak yang terlibat sebagai masyarakat dapat ikut berpartisipasi secara maksimal, sehingga kegiatan pembantuan ini lebih transparan
 - b. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan instansi yang bertanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat rumah yang telah terpilih yang akan di renovasi tetapi masih ada beberapa rumah yang belum di laksanakan.
 - c. Pada kegiatan pemabangunan rumah layak huni diperlukan juga kerja sama antara pemerintah dan masyarakat selaku penerima untuk saling berkordinasi dalam pelaksanaan agar kedua pihak saling menguntungkan. Pihak pemerintah selaku pelaksana dapat mengerjakan pembangunan sesuai dengan target dan penerima dapat menikmati program pemerintah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menemukan masalah-masalah yang terjadi penulis memberikan beberapa saran dan upaya yang dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sebagai berikut;

1. Agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan lebih di sosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan kegiatan.
2. Dalam penetapan penerima bantuan rumah layak huni agar lebih memperhatikan kriteria-kriteria dalam penerimaan rumah layak huni, sehingga bantuan yang diberikan tepat pada sasaran yaitu kepada orang yang sangat membutuhkannya.
3. Kepada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satu instansi yang terkait dan selaku pelaksana program pemabangunan rumah layak huni sebaiknya memberikan kepastian kepada masyarakat (pemohon) setelah melakukan pemantauan lokasi rumah-rumah mana saja yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pembangunan/renovasi agar masrakat tidak menunggu terlalu lama tanpa kepastian.
4. Seharusnya dinas Perkim selaku pelaksana menjelaskan cara atau proses penerima BSPS ini dulu sebelum memberikan dana, yang mana agar tidak terjadi kesalah pahaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Makasar : Raja Grafindo Persada
- David R.fred.2010.*strategic management strategi konsep*.;Jakarta.salemba empat
- EM hakim, lukman, 2011, *pengantar administrasi pembangunan*. Yogyakarta: ar.ruzz media
- Hasibuan, Melayu S.P, 2001 *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Bandung, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P 2002. *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Manulang. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mulyadi, dedi, 2016, *studi kebijakan public dan pelayan public*. Bandung; alfabeta
- Nurmasari, Zukifli. 2015. *Pengantar Manajemen* . Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Ridhotullah,subektidan mohammad jauhar.2015.*pengantar manajemen*. pekanbaru. publishing,marpoyan tujuh
- Rohman, Abd, 2018, *dasar- dasar manajemen public*, malang; empat dua.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi* : Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, P, Sondang. 1999. *Administrasi Pembangunan; konsep, dimensi, strateginya*: Bumi askara
- Sukirno,sadono.2016.*mikro ekonomi teori pengantar edisi ketiga*.depok.PT raja grafindo persada
- Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sufian, Hamim. 2003. *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Siagian, P. siagian, 2000,*administrasin pembangunan konsep, dimensi, dan strateginya*.jakarta: bumi aksara

- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Tangkilasan s noggin hessel, 2008, *kebijakan dan manajemen otonomi daerah*, Yogyakarta: lukman offsed
- Zulkifli. 2014. *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa Fakultas Ilmu Dan Ilmu Politik*. Pekanbaru : Badan Penerbit Fisipol UIR
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru

DOKUMENTASI

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

peraturan gubernur riau nomor 21 tahun 2019 tentang pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

peraturan daerah provinsi riau nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi riau tahun 2014-2019 dan peraturan daerah provinsi riau nomor 16 tahun 2018

tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dilaksanakan bantuan pembangunandan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Perwako nomor 95 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, dan fungsinya serta tata kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota

